

DAMPAK KEBIJAKAN PPKM BAGI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN UMKM DI KELURAHAN PUCANG

¹Nurul Azizah ²Alfi Huurin³Iin, ³Dimas Adhi Pramana Yusuf, ⁴Lilis Rakhmawati

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: nurulazizah.adbis@upnjatim.ac.id

Abstract

The PPKM policy implemented by each Regional Government results in problems that arise in the wheels of the economy that exist in the community. The problems that arise do not exclude SMEs in Pucang Village because during the Covid-19 Pandemic they have experienced a decline in income, this interests us to examine how the impact of PPKM policies for SMEs in Pucang Village which experienced a decline in the economy previously caused by the Covid Pandemic -19. This study aims to determine how much impact the PPKM policy has on the economic development of MSME's in Kelurahan Pucang Kabupaten Sidoarjo. The research method that we use in this study is a descriptive qualitative research method with data collection techniques using interviews and observations. The results we obtained in this study are that one of the impacts of this policy is the decline in the income of MSMEs around the Pucang village. The difficulty of turning the wheels of the local economy is because many residents depend on the income of these businesses. To be able to increase income, MSME actors market their products through online marketing such as marketplaces.

Keywords: PPKM Policy; Economy; MSMEs.

Abstraksi

Kebijakan PPKM yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintahan Daerah mengakibatkan adanya permasalahan yang timbul dalam roda perekonomian yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang timbul tidak mengecualikan UMKM Kelurahan Pucang karena selama Pandemi Covid-19 sudah membuat mereka mengalami penurunan pendapatan, hal ini menarik minat kami untuk meneliti bagaimana dampak dari kebijakan PPKM bagi UMKM di Kelurahan Pucang yang mengalami penurunan dalam bidang perekonomian yang sebelumnya diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan kebijakan PPKM terhadap perkembangan perekonomian

UMKM di Kelurahan Pucang Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil yang kami peroleh dalam penelitian ini adalah Salah satu dampak adanya kebijakan ini adalah menurunnya pendapatan UMKM yang berada di sekitaran kelurahan Pucang. Sulitnya berputar roda perekonomian warga dikarenakan banyak warga yang bergantung pada penghasilan usaha tersebut. Untuk dapat meningkatkan penghasilan, para pelaku UMKM memasarkan produknya melalui pemasaran online seperti marketplace.

Kata Kunci : *Kebijakan PPKM;Perekonomian;UMKM.*

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 sejak setahun lalu. Dengan adanya keadaan seperti ini, pemerintah diharuskan untuk memutar otak untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan baru bagi penduduknya. Pada keadaan pandemi Covid-19 saat ini tentunya mobilitas masyarakat dibatasi demi mencegah terjadinya kerumunan di tempat-tempat umum. Pandemi ini memberi banyak dampak yang kurang positif, baik bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat, contohnya seperti banyak tenaga kerja yang dirumahkan oleh perusahaan tempat kerjanya, tidak sedikit pula para pelaku usaha atau UMKM (Unit Mikro, Kecil, dan Menengah) menerima dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini.

Ketika virus Covid-19 pertama kali memasuki Indonesia, pemerintah dalam mengatasinya mengeluarkan kebijakan

lockdown untuk setiap daerah. Dengan menilik dari website (Garjito & Bhayangkara, 2020) Lockdown memiliki arti bahwa adanya suatu kondisi yang

melarang warganya untuk pergi ke suatu daerah karena terdapat kondisi yang darurat. Lockdown juga dapat bermakna bahwa setiap negara yang menutup akses setiap wilayahnya agar tidak ada masyarakat yang dapat keluar ataupun masuk ke dalam negara tersebut. Ketika lockdown diterapkan pada suatu daerah, terdapat area khusus yang digunakan untuk mengkarantina. Karantina ini berfungsi untuk memisahkan baik itu bagi masyarakat yang sudah terpapar Covid-19 maupun yang masih sehat dan belum terpapar sehingga mengurangi laju penyebaran Covid-19 yang saat ini sedang meningkat. Untuk setiap masyarakat yang masih belum terpapar virus Covid-19 diharuskan menerapkan protokol kesehatan salah satunya adalah *social distancing*. *Social distancing* merupakan salah satu tindakan yang mana digunakan untuk meminimalisir terjadinya penularan Covid-19 dengan cara menerapkan setiap individu diharuskan menjaga jarak dengan yang lainnya sekitar 1,5 meter.

Setelah lockdown sudah diberlakukan, angka peningkatan pasien Covid-19 mengalami penurunan sehingga kebijakan penutupan setiap daerah diberhentikan dan setiap masyarakat di Indonesia sudah bisa memulai kegiatan seperti biasa namun tetap menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika memiliki jadwal diluar rumah, masih berlakunya WFH pada setiap

lokasi pekerjaan dan masih banyak lagi. Kemudian pada pertengahan tahun 2021, angka pasien Covid-19 tiba-tiba mengalami peningkatan yang sangat pesat dari sebelumnya dan banyak sekali warga yang meninggal hingga mencapai angka tertinggi bagi mereka yang terinfeksi dan meninggal diakibatkan Covid-19 ini. dikarenakan banyaknya jumlah yang berjatuh, pemerintah memulai kembali mengadakan kebijakan pembatasan untuk setiap daerah.

Sebelum Covid-19 ada dan menjangkit seluruh Indonesia, dengan mengutip dari (Santosa, 2020) pertumbuhan perekonomian yang dialami oleh Indonesia pada kuartal keempat pada tahun 2019 berada di bawah prosentase 5% dengan berada di angka 4,97%. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian yang dialami oleh Indonesia pertumbuhan yang dialaminya sedikit lebih rendah dengan apa yang sudah menjadi target dari pemerintahan yang sebelumnya menargetkan angka sebesar 5,3%. Setelah pandemi Covid-19 mulai ada dan tersebar di Indonesia, mengakibatkan adanya dampak negatif pada sektor perekonomian dengan mengutip dari (Zulkipli & Muharir, 2021) salah satunya adalah adanya PHK yang terjadi secara besar-besaran kemudian selain itu terjadi juga inflasi yang mana telah mencapai angka sebesar 2,96%. Dikarenakan Covid-19 yang sampai membuat penurunan pada perkembangan

perekonomian Indonesia, ternyata terdapat banyak aspek yang juga terkena dampak negatifnya seperti mereka para pekerja lepas yang hanya bekerja harian, pelaku UMKM, usaha restoran dan masih banyak lagi usaha yang menyangkut pekerjaan banyak orang sekaligus. Ketika dampak ini timbul dalam kehidupan bermasyarakat yang berefek pada turunnya daya beli yang dimiliki masyarakat karena minimnya perputaran keuangan yang mereka miliki. Selain dampak negatif yang hadir ketika masa Pandemi Covid-19 rupanya Pandemi ini juga menimbulkan dampak positif bagi perekonomian Indonesia hal ini disebabkan pada saat ini barang impor susah masuk ke Indonesia karena adanya pembatasan sehingga masyarakat Indonesia mau tidak mau diharuskan untuk membeli produk lokal karena tidak adanya pilihan selain hal tersebut sehingga membantu perekonomian bagi mereka yang menyediakan apa yang masyarakat luas butuhkan.

Dikutip dari (Putra & Basri, 2019) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008 memiliki makna bahwa untuk usaha mikro adalah usaha yang merupakan milik perorangan maupun badan usaha perorangan, kemudian untuk usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan umumnya dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha walaupun bukan merupakan milik anak perusahaan maupun sebuah cabang

perusahaan dari usaha besar, dan yang terakhir adalah usaha menengah yang mana merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan umumnya dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha walaupun bukan merupakan milik anak perusahaan maupun sebuah cabang perusahaan dari usaha besar. Setiap usaha untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan dianggap merupakan bagian dari salah ketiganya apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Dengan mengutip dari (Sari & Karmini, 2019) dalam masyarakat UMKM memiliki peran yakni sebagai salah satu mata pencaharian mereka dan digunakan sebagai wadah untuk mampu mengembangkan potensi maupun keterampilan tiap warga yang menjadi bagian dari UMKM itu sendiri. Selain itu, UMKM juga berperan bagi pembangunan yang ada di daerah, salah satu peran yang dimiliki adalah karena UMKM mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan dan masyarakat dapat terbantu kesejahteraannya dan mengurangi angka kemiskinan yang ada pada daerah tersebut.

Di masa pandemi saat ini ketika angka pasien positif Covid-19 sedang melonjak, mau tidak mau pemerintah harus melakukan social distancing dan memerintahkan setiap daerah untuk

menerapkan kebijakan pembatasan sosial karena itu merupakan kebijakan masing-masing kepala daerah yang sudah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya sendiri. Pada saat ini ketika jumlah pasien sedang meningkat, pemerintah menghimbau untuk setiap daerah segera melakukan PSBB tahap kedua atau yang sekarang disebut sebagai PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Selain itu, adanya PPKM ini juga menurunkan daya beli para konsumen dikarenakan banyak dari mereka yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan sehingga keadaan ekonominya terus menurun karena berkurangnya pemasukan finansial. Berkurangnya omzet penjualan UMKM ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dari pedagang sebagai pelaku UMKM, karena umumnya pelaku UMKM ini menggantungkan pendapatannya pada satu sector saja, maka dari itu apabila sector tersebut mengalami penurunan penjualan tentunya akan sangat merugikan para pelaku UMKM. Adanya PPKM ini ditambah dengan Pandemi COVID-19 yang belum usai juga ditambah dengan munculnya varian baru dari virus tersebut membuat banyak pelaku UMKM sangat tersiksa dan berjuang mati-matian untuk menyambung hidup.

METODE

Dalam penelitian ini, metode

penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2005), penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena terhadap subjek penelitian tentang apa yang dialami oleh subjek tersebut misalnya perilaku, tanggapan, motivasi, aktivitas, dan lainnya secara holistic, dan dengan mendeskripsikan dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu situasi khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah. Berdasarkan pengertian yang diberikan, penelitian kualitatif dipandang cocok untuk dijadikan metode dalam penelitian kami, hal ini dikarenakan untuk memahami fenomena yang terjadi yakni implementasi kebijakan insentif pajak dalam bentuk persepsi dari subjek penelitian yang diolah dalam bentuk metode alamiah.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 dengan berlokasi di Kelurahan Pucang Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan sumber data yakni berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap UMKM yang berada di wilayah Kelurahan Pucang Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dalam penelitian ini kami mengumpulkan data melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku dan jurnal-jurnal yang menjadi gambaran kami ketika mengerjakan penelitian ini.

Teknik analisis yang akan kami

lakukan adalah yang pertama melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi data menurut Miles dan Huberman (1984) melalui wawancara yakni tentang insentif pajak, kedua reduksi data dengan meringkas hasil penelitian. Ketiga, penyajian data dalam bentuk deskripsi. Keempat adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Pembatasan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan daerah dengan instruksi dari pemerintah pusat diberikan nama sebagai PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dimulai sejak 12 Juli 2021 dengan menutup banyaknya jalan utama dan membatasi kegiatan di hampir semua lini masyarakat. Mulai dari pembatasan jam buka toko di hampir semua jenis, apabila restoran dan atau sejenisnya dihimbau untuk tidak membuka sistem makan ditempat dan jika terpaksa membuka makan ditempat harus dengan kapasitas maksimal 50% serta pelaksanaan protocol kesehatan yang ketat. Untuk sejenis supermarket atau toko bahan

pangan dibolehkan buka hingga pukul 21.00 serta untuk apotek dibolehkan buka selama 24 jam.

PPKM ini sendiri datang dengan beberapa dampak, baik itu positif ataupun negative. Dari segi dampak positif yaitu dengan adanya PPKM ini situasi lalu lintas menjadi lebih lenggang sehingga mengurangi kemacetan di area Kota, juga dengan berkurangnya jumlah kendaraan yang lalu lalang menjadikan berkurangnya polusi udara yang biasanya diakibatkan dari asap knalpot kendaraan bermotor. Dari segi dampak negative yaitu adanya PPKM ini memberikan kerugian bagi pedagang selaku UMKM yang mana hasil penjualannya menurun drastis karena jarang ada konsumen yang datang untuk membeli dagangannya, sehingga omzetnya terus turun dalam beberapa bulan kebelakang.

PPKM ini juga dilakukan di Kelurahan Pucang Kabupaten Sidoarjo. Kelurahan Pucang ini sendiri adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan Pucang berada dekat dengan Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo. Keseluruhan luas wilayah Kelurahan Pucang adalah sebesar 80.321,60 Ha. Jumlah penduduk dilihat pada tahun 2021 (Sekarang) mencapai 5.026 orang. Mayoritas warga bermata pencaharian di bidang perindustrian dan

perdagangan serta mayoritas agama yang dianut oleh warga Kelurahan Pucang adalah Islam. Fasilitas yang dimiliki kelurahan Pucang diantara lain (1) Fasilitas Pendidikan : NU Pucang (MI, MTs dan MA), SDN 2 dan 5 Pucang serta SMA PGRI 5 dan SMK PGRI 2 Sidoarjo, (2) Tempat Ibadah terdiri dari 6 masjid, (3) Pemakaman Umum terdiri dari 4 Makam, (4) Tujuan pariwisata contohnya seperti Indah Bordir dan Fave Hotel, serta (6) fasilitas umum lainnya seperti Rusunawa.

PPKM ini berdampak ke UMKM yang berada di sekitaran kelurahan Pucang. UMKM mengalami penurunan pendapatan dikarenakan aktivitas diluar rumah dibatasi, contohnya seperti sekolah yang diliburkan

Dalam penjelasan ini didukung oleh beberapa narasumber yang memiliki UMKM yang berada di Kelurahan Pucang salah satunya yaitu warga yang berinsialkan AV (26) yang mengatakan bahwa:

“ dengan adanya covid ini sangat sangat berdampak dalam perekonomian saya soalnya dari mulai ada covid ini apalagi sekarang ditambah dengan adanya PPKM jadi aktivitas belajarmengajar di SD diliburkan jadi agak sepi, sangat bedampak sekali dengan adanya covid ini biasanya hanya ada orang-orang yang lewat saja”

Dari pertanyaan diatas menandakan dengan adanya kebijakan PPKM ini sangat berdampak sekali terhadap pedagang yang menyebabkan roda perekonomian menjadi sangat sulit berputar khususnya pada UMKM yang hasil sehari-harinya hanya mengandalkan penghasilan dari penjualan tersebut. Selain itu hal ini juga dirasakan oleh pak Dul (60) yang memiliki usaha penjualan sembako yang berada di kawasan Kelurahan Pucang warga RT 14 RW 3, beliau mengatakan bahwasannya:

“ memang saya kira dampak PPKM walaupun kita sama-sama kita merasakan semua namanya orang berjualan ya turunnya perekonomian kalo dihitung secara presentase ya bisa turun 60% yang dulunya sebelum PPKM penghasilan 1.000.000 sekarang hanya 400.000 apalagi ini penjualan sembako ini sebagai profesi saya atau penghasilan utama saya”

Oleh karenanya dari penjelasan dua narasumber diatas yang memiliki UMKM dengan adanya PPKM ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Tetapi tak hanya UMKM kecil yang ikut merasakan akan dampak adanya PPKM ini melainkan seseorang yang memiliki UMKM menengah juga merasakannya. Pernyataan ini didukung oleh seorang kasir yang menjaga disalah satu toko oleh-oleh khas Sidoarjo yang berada di sekitaran Kelurahan Pucang yang

mengatakan bahwa:

“ Penjualan sangat mengalami penurunan karena dimana-mana orang tidak boleh keluaran pas jalan-jalan disekitaran banyak adanya penyekatan jadi jalannya itu muter jadi orang-orang itu males yang keluar”

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi kesimpulan yang bisa diambil dengan adanya PPKM ini dampak terhadap UMKM yang ada di Kelurahan Pucang sangat mempengaruhi intensitas penjualan yang mengalami penurunan hingga berdampak pada perekonomian atau keberlangsungan hidup masyarakat Pucang yang semakin susah untuk meraut keuntungan. Namun para pelaku UMKM tetap berupaya untuk meningkatkan keuntungan usaha dengan melalui pemasaran online ataupun aplikasi yang dapat membantu dalam memasarkan produknya seperti pada fitur aplikasi GO-JEK ataupun aplikasi marketplace.

Dengan adanya kebijakan PPKM ini telah menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat Indonesia khususnya provinsi yang menerapkan PPKM darurat. Jika dilihat dari segi kesehatan dengan adanya PPKM ini diharapkan mampu menekan angka penyebaran Covid-19 sebagaimana pernyataan ini didukung oleh Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono.

“ Menurut saya cukup efektif, cukup kuat dalam menurunkan kasus,” ungkap Miko dalam diskusi daring bertajuk “ PPKM Darurat ” diberlakukan, Efektifkah?’, Tetapi jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi sangat jelas sekali sangat mengalami penurunan. Kementerian Keuangan mengkaji bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, eksistensi UMKM, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, penurunan kinerja perusahaan. Hal ini juga dilihat dari hasil wawancara 3 narasumber diatas yang mengalami penurunan penghasilan. Pernyataan pro dan kontra ini di utarakan oleh salah satu warga yang berada di Kelurahan Pucang yaitu pak Dul (60), beliau mengatakan bahwa

“ kalo untuk terkait PPKM menurut saya itu ada baiknya dapat memutus rantai covid- 19 yang semakin luas cuman masalah untuk orang kecil lebih diberikan kelonggaran karena banyak orang yang masih susah untuk mencari makan, kadang hari ini adan untuk uang makan tapi besoknya mereka harus bekerja keras lagi untuk mencari uang dan beli makan”

Namun meski pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan khususnya disektor UMKM pemerintah telah menerapkan strategi untuk

memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satunya pemberian dana bantuan kepada pelaku usaha yang memiliki UMKM yang dimana strategi ini bertujuan untuk menyelamatkan UMKM pada masa pandemic ini. Program penyaluran bantuan sosial tersebut dalam bentuk kemitraan UMKM seperti pelonggaran kredit, dukungan bahan baku, dan distribusi paket sembako. Adanya pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan akan membantu para pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usaha ditengah masa pandemi Covid-

19. Kepedulian pemerintah juga dalam bentuk pemberian insentif pajak bagi UMKM. Adanya insentif pajak diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga perekonomian dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19. Hasil penelitian dari Sugiri (2020) menemukan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, perluasan modal kerja berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Dalam penyaluran dana bantuan ini jugadidukung oleh pertanyaan dari pak Dul selaku warga yang mendapatkan program bantuan pemerintah

“ saya mendapatkan bantuan dari pemerintah dikhususkan untuk pedagang kaya pedagang soto,sembako dan bahkan

maksimalnya sebesar Rp.500.000.000 dan untuk teknis pelaksanaannya saya mendaftarkan di kelurahan”

Dari pernyataan yang di utarakan oleh pak Dul bahwasanya bantuan pemerintah ini langsung didistribusikan kepada pelaku usaha atau UMKM yang sedang membuka peluang usaha baru yang sebagaimana diatur oleh UU No.20 Tahun 2008 yaitu:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling sebanyak Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000

PENUTUP

Pembatasan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan daerah dengan instruksi dari pemerintah pusat diberikan nama sebagai PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dimulai sejak 12 Juli 2021 dengan menutup banyaknya jalan utama dan membatasi kegiatan di hampir semua lini masyarakat. PPKM ini memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu kelurahan yang menerapkan program ini adalah Kelurahan Pucang yang mayoritas warganya bermata pencaharian dibidang perindustrian dan perdagangan. Salah satu dampak adanya kebijakan ini adalah menurunnya pendapatan UMKM yang berada di sekitaran kelurahan Pucang. Sulitnya berputar roda perekonomian warga dikarenakan banyak warga yang bergantung pada penghasilan usaha tersebut. Untuk dapat meningkatkan penghasilan, para pelaku UMKM memasarkan produknya melalui pemasaran online seperti marketplace.

Meskipun pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan khususnya disektor UMKM, pemerintah telah menerapkan strategi untuk memberikan stimulasi kepada para

pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku sebagaimana sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Salah satunya pemberian dana bantuan kepada pelakuusaha yang memiliki UMKM yang dimana strategi ini bertujuan untuk menyelamatkan UMKM pada masa pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Garjito, D., & Bhayangkara, C. S. (2020).

Arti Lockdown, Social Distancing, dan Istilah Corona Lainnya.

Retrieved July 15, 2021, from

Suara.com website:

[https://www.suara.com/news/2020/03/18/105643/arti-lockdown-social-](https://www.suara.com/news/2020/03/18/105643/arti-lockdown-social-distancing-dan-istilah-corona-lainnya?page=all)

[distancing-dan-istilah-corona-lainnya?page=all](https://www.suara.com/news/2020/03/18/105643/arti-lockdown-social-distancing-dan-istilah-corona-lainnya?page=all)

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Putra, A., & Basri, H. (2019).

Representasi Kehidupan Sosial

Ekonomi Pelaku Usaha MikroKecil

Menengah (UMKM) Dikawasan

Objek Wisata Percandian Muaro

Jambi-ProvinsiJambi. *JBMP (Jurnal*

Bisnis, Manajemen Dan Perbankan),

5(1), 1–7.

[https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i1.2](https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i1.2036)

036

Santosa. (2020). ANALISIS DAMPAK

PANDEMI COVID 19

TERHADAP PEREKONOMIAN
LOKAL DARI SUDUT

PANDANG JENIS PEKERJAAN
DANPENDAPATAN

TERHADAP TINGKAT DAYA
BELI MASYARAKAT DI

JAWA

TENGAH. *Prepotif: Jurnal
Kesehatan Masyarakat*, 4(2), 253–267.

Sari, M. P., & Karmini, N. L. (2019).
KELUARGA PADA UMKM DI
KECAMATAN

KUTA UTARA. *E-Jurnal*

Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Udayana, 8(10),

1161–1192.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Zulkipli, & Muharir. (2021). DAMPAK
COVID-19 TERHADAP
PEREKONOMIAN

INDONESIA. *Jimesha:*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Ekonomi Syariah, 1(1), 7–12.

[https://doi.org/10.36908/jim](https://doi.org/10.36908/jimesha)

esha